

Indikator Kesejahteraan Rakyat *Welfare Indicators* 2010



Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional) serta instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup meliputi antara lain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, serta sosial budaya. Dengan demikian, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010 diharapkan mampu menjembatani dan memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran untuk perbaikan publikasi sangat diharapkan bagi penyajian di masa mendatang.

Yogyakarta, November 2011

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Kepala,

Dyan Pramono Effendi, SE, ME
NIP: 19570110 197803 1 001

This annual publication of Welfare Indicators 2010 is published by BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province. It presents the information on welfare status, its trends and variation among regency/city. It presents statistical information calculated from the latest data available at BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province and other institutions.

This publication includes the measurable aspects of welfare/quality of life reports. They are population, health and nutrition, education, employment, consumption, housing and social concern. We hope that the publication qualifies itself to fill the gap between availability and the need of respective information.

We sincerely appreciate to whom has kindly made significant contribution to this publication. Finally, we are always appreciate to any comment on this publication for further improvement of the similar publications in the coming years.

Yogyakarta, November 2011

**BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province
Head,**

Dyan Pramono Effendi, SE, ME
NIP: 19570110 197803 1 001

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan gambaran tingkat kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Dalam publikasi ini, kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan permukiman, serta sosial budaya.

Peningkatan taraf kesejahteraan rakyat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kesehatan antara lain terlihat dari kenaikan Angka Harapan Hidup. Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan oleh BPS terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi D.I. Yogyakarta untuk kurun waktu 2000-2025 tahun rujukan 2005 dan 2005-2025 tahun rujukan 2010 mengalami peningkatan dari 74,0 tahun menjadi 74,7 tahun. Dari aspek ketenagakerjaan, sektor pertanian tetap merupakan lapangan usaha utama di dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari sisi pengeluaran konsumsi, kondisi kesejahteraan rakyat justru mengalami sedikit penurunan. Pada 2010 bila dibanding 2009, persentase pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan mengalami penurunan, dan sebaliknya persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan meningkat. Pada 2010 persentase pengeluaran untuk komoditas bukan makanan turun dari 53,66 persen di tahun 2009 menjadi 52,73 persen di tahun 2010, sedangkan persentase pengeluaran untuk makanan naik dari 46,34 persen menjadi 47,27 persen.

Indikator perumahan relatif mengalami peningkatan, seperti sumber air minum yang dimiliki, pada 2010 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum meningkat dari tahun lalu, yaitu dari 89,25 persen menjadi 89,69 persen. Sedangkan persentase rumah tangga dengan lantai tanah mengalami penurunan yaitu dari 9,28 persen pada tahun 2009 menjadi 7,81 persen pada tahun 2010. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta pada 2010 mengalami penurunan cukup tajam dari tahun sebelumnya. Sementara itu penduduk yang menunaikan ibadah haji pada 2010 sedikit mengalami kenaikan.

The 2010 Welfare Indicators of Daerah Istimewa Yogyakarta Province is annual publication to present the information on welfare status from time to time that distinguished by regency/city. In this publication the aspects of welfare in concern are population, health, education, labour force, consumption level and patterns, housing and settlement, and socio culture.

The significant improvement in welfare status of society in health is reflected in increases of Life Expectancy at Birth (e_0). According to population projection, Life expectancy of D. I. Yogyakarta Province increased from 74.0 years (in duration 2000-2005) to 74.7 years (in duration 2005-2010). Agricultural sector is still the main industry in absorbing employment in Daerah Istimewa Yogyakarta Province. Almost 30 percent Population 15 years old and over was recorded have jobs in agricultural industry.

Compared to household situation in 2009, in 2010 the share of nonfood expenditure decreased, while the share of food expenditure to total household expenditure increased. The share of non food expenditure decreased from 53.66 percent to 52.73 percent, while share of food expenditure to total household expenditure increased from 46.34 percent to 47.27 percent.

In 2010, the housing indicators such as percentage of drinking water owned increased compare to 2009. The numbers of tourists in 2010 who visited Yogyakarta decreased, meanwhile the number of pilgrim going to Mecca increased in 2010.

Daftar Isi / Contents

Halaman
page

Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii-iv
Abstraksi/ <i>Abstract</i>	v-vi
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	vii
Singkatan dan Akronim/ <i>Abbreviation and Acronyms</i>	viii
Penjelasan Teknis/ <i>Technical Notes</i>	ix-xiv
Pendahuluan/ <i>Introduction</i>	xv-xvi
Tinjauan Umum/ <i>Overview</i>	xvii
1. Kependudukan/ <i>Population</i>	1-9
2. Kesehatan/ <i>Health</i>	10-19
3. Pendidikan/ <i>Education</i>	20-29
4. Angkatan Kerja/ <i>Labour Force</i>	30-35
5. Taraf dan Pola Konsumsi/ <i>Consumption Level and Patterns</i>	36-42
6. Perumahan dan Permukiman/ <i>Housing and Settlements</i>	43-49
7. Pariwisata dan Keagamaan / <i>Tourism and Religion</i>	50-52
Lampiran/ <i>Appendix</i>	53-64
Daftar Pustaka/ <i>References</i>	65

Singkatan dan Akronim/ *Abbreviation and Acronyms*

KB	Keluarga Berencana/ <i>Family Planning</i>
AKB/IMR	Angka Kematian Bayi/ <i>Infant Mortality Rate</i>
AHH/e ₀	Angka Harapan Hidup/ <i>Expectancy of Life</i>
AMH	Angka Melek Huruf/ <i>Literacy Rate</i>
S D/PS	Sekolah Dasar/ <i>Primary School</i>
S L T P/ JHS	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ <i>Junior High School</i>
S L T A/ SHS	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ <i>Senior High School</i>
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional/ <i>National Socio Economic Survey</i>
SP/ PC	Sensus Penduduk/ <i>Population Census</i>
SDKI	Survei Demografi Kesehatan Indonesia/ <i>Demography Health Survey</i>

1. **Penduduk menurut kelompok umur** adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, dan biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok interval 5 tahunan yang dimulai dari usia 0 tahun.
2. **Kepadatan Penduduk/Km²** adalah rata-rata jumlah penduduk per km².
3. **Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah ukuran rata-rata kecepatan pertambahan penduduk per tahun.
4. **Angka Beban Tanggungan** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang pada usia yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun).
5. **Umur Perkawinan Pertama** menunjukkan umur saat seseorang melangsungkan upacara perkawinan yang pertama.
6. **Rumah Sakit** adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis.
7. **Puskesmas** adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat

disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

8. **Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis** apabila ia dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu huruf.

9. AMH

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

10. Angka Partisipasi Kasar

Persentase antara jumlah murid SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun.

11. Angka Partisipasi Murni

Perbandingan antara murid SD/SLTP/SLTA usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun dengan penduduk usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun (dalam persentase).

12. Angka Putus Sekolah

Persentase antara jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas yang putus sekolah di SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7 tahun/13 Tahun/16 Tahun ke atas.

13. **Sekolah** adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (mulai tahun 2010 ditambah non formal).

14. Rasio murid terhadap guru SD/SLTP/ SLTA :

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/SLTP/SLTA}}{\text{Jumlah guru SD/SLTP/SLTA}}$$

15. Rasio murid per kelas SD/SLTP/ SLTA :

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/SLTP/SLTA}}{\text{Jumlah kelas SD/SLTP/SLTA}}$$

16. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

17. **Bekerja** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam seminggu yang lalu.

18. **Pengangguran** adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK):

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas}} \times 100\%$$

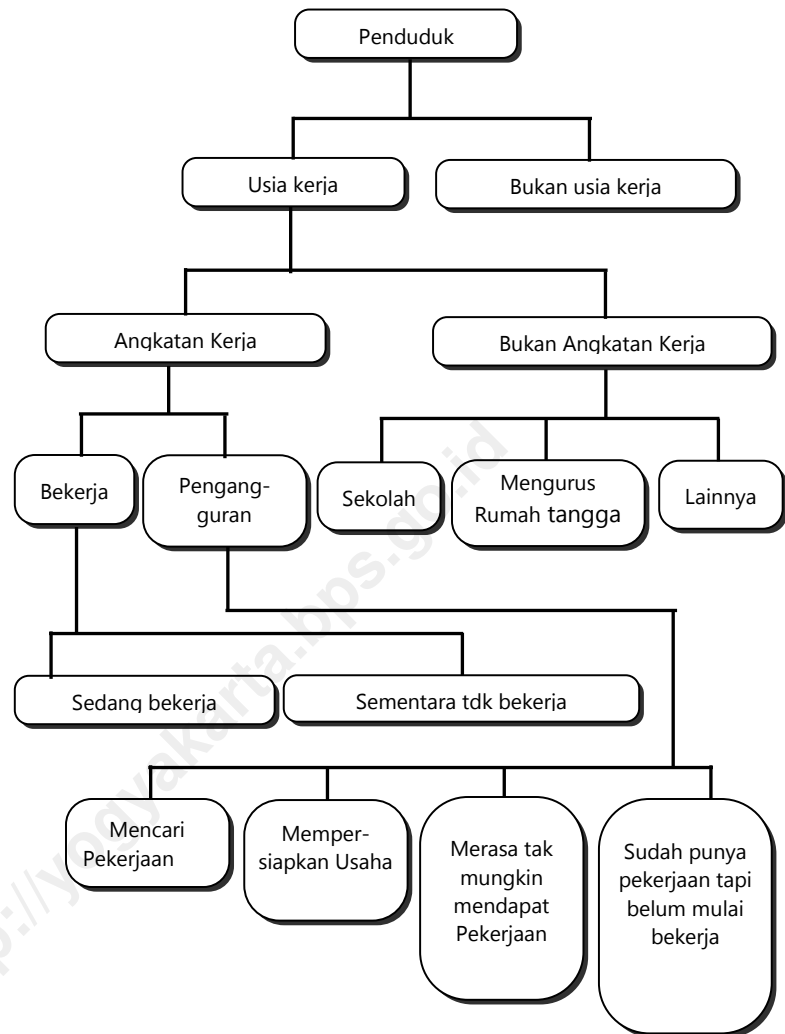
21. **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

22. **Bukan Angkatan Kerja** adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun bukan pengangguran, seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau tua dan cacat.

23. **Sekolah** adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur (mulai tahun 2010 termasuk non formal).

24. **Mengurus Rumah Tangga** adalah penduduk 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah/gaji.

25. Bagan Ketenagakerjaan:



26. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

27. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.

28. **Konsumsi Rumah Tangga** adalah pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Kelompok makanan mencakup pengeluaran konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan kelompok bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dsb.

29. **Pengeluaran rata rata perkapita sebulan** adalah rata rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Tujuan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi D.I Yogyakarta 2010 merupakan publikasi yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi statistik yang disajikan memberi gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi selama tahun 2008-2010.

Ruang Lingkup

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangannya antar waktu serta perbandingan antar kabupaten/kota. Publikasi ini menyajikan indikator-indikator input, proses dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut.

Dimensi Kesejahteraan Rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat tidak hanya dapat terlihat (*visible*) dari suatu aspek tertentu. Dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari beberapa aspek yang spesifik, yaitu aspek Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Sosial Budaya.

Dalam pengertian yang luas sangat tidak mungkin untuk menyajikan statistik atau indikator yang mampu untuk mengukur kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator yang disajikan dalam terbitan ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*).

Sumber Data

Sumber data utama Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) 2010 ini merupakan data primer, dalam arti dikumpulkan dan diolah sendiri oleh Badan Pusat Statistik, baik BPS Pusat maupun BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan lain-lain. Data primer yang telah disebut di atas mempunyai keterbatasan sebagai sumber informasi publikasi tahunan.

Upaya untuk menyediakan sumber data yang tetap bagi publikasi Inkesra telah dilakukan melalui perluasan cakupan pertanyaan pokok (data kor) Susenas yang diadakan setiap tahun. Dengan demikian publikasi Inkesra mempunyai sumber data yang pasti dan berkesinambungan sehingga selalu dapat menyajikan data yang relatif *up to date*. Selain menggunakan data primer publikasi ini juga mengolah data sekunder yang berasal dari instansi-instansi pemerintah yang terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Departemen Agama, dan sebagainya.

Tinjauan Umum/ *Overview*

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia dan mempunyai jumlah penduduk 3,47 juta (angka Sensus Penduduk 2010).

Penekanan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya :

1. Meningkatkan peranan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan.
2. Memperkuat citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama.
3. Meningkatkan peranan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pusat pelayanan perdagangan dan transportasi regional.

Dari penjelasan tersebut di atas tentu saja akan banyak membawa dampak positif, terutama dalam bidang ekonomi apabila pembangunan di bidang-bidang tersebut dapat berhasil.

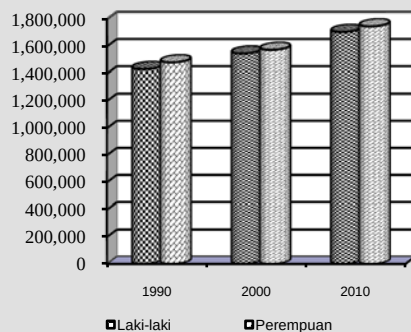
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Untuk itu diperlukan berbagai sumber daya antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya yang paling menentukan keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yaitu penduduk, disamping juga aset atau sumber daya lainnya. Penduduk dalam hal ini diposisikan menjadi pelaku sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

Penduduk selain sebagai pendukung pembangunan, juga dapat menjadi penghambat proses pembangunan. Semakin banyak jumlah penduduk seharusnya semakin banyak pelaku pembangunan dan diharapkan juga akan memberikan *input* pembangunan yang bernilai lebih. Jumlah penduduk yang banyak dan diikuti dengan kualitas yang baik, maka penduduk akan menunjang pembangunan. Sedangkan kondisi dimana jumlah penduduk yang banyak namun dengan kualitas yang minim hanya akan menghambat pembangunan. Menurut Coale-Hoover Theory (1950), laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat pembangunan sosial ekonomi.

Oleh karena itu, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan, yang antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan dalam menangani permasalahan penduduk, maka kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas sumber

daya manusia, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan demikian diharapkan tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar merata di seluruh wilayah sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Gambar 1.1: Perkembangan Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta, 1990-2010



Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000, 2010

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan jumlah perempuan semakin lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pada 2010 jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 3,5 juta jiwa dengan sex ratio 98.

Tabel 1.1 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Bali, 1990-2010

Table 1.1 Population Annual Growth Rate by Province in Java and Bali, 1990 – 2010

Provinsi/Province	1990 -2000	2000 -2005	2000-2010
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI Jakarta	0,17	1,24	1,41
Jawa Barat	2,03	1,85	1,90
Jawa Tengah	0,94	0,41	0,37
D.I. Yogyakarta	0,72	1,52	1,04
Jawa Timur	0,70	0,97	0,76
Banten	2,21	2,30	2,78
Bali	1,31	1,57	2,15
Indonesia	1,49	1,40	1,49

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2010 dan Sensus Penduduk 2010

Source :BPS, 2010 Statistical Yearbook of Indonesia and 2010 Population Census

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2000-2010 sebesar 1,04 persen

Sedangkan pada tahun 2000 jumlah penduduk D.I Yogyakarta sekitar 3,1 juta jiwa dengan sex ratio 98,2 (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2000 dan 2010).

Bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali, untuk periode 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat diurutan ketiga terkecil setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu sebesar 1,04 persen.

Apabila dibandingkan dengan angka nasional, pada periode 2000-2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju pertumbuhan lebih rendah. Padahal pada kurun waktu 2000-2005 laju pertumbuhan penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta justru sedikit lebih tinggi dibanding angka nasional. Selama periode 1990-2000 dan 2000-2005 laju pertumbuhan penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta memperlihatkan tren naik (lihat tabel 1.1).

Kepadatan Penduduk

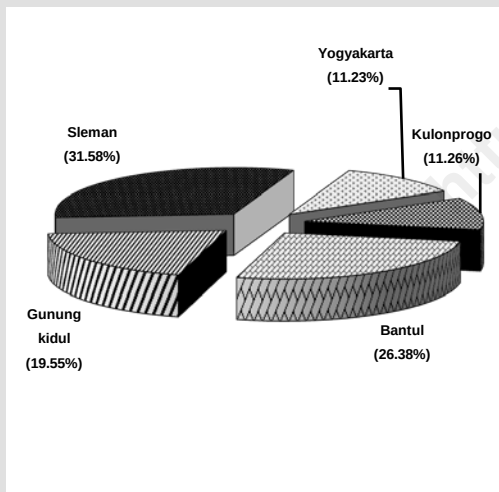
Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah (kepadatan penduduk kasar atau *crude population density*). Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator kependudukan yang umum digunakan karena mampu mencerminkan tingkat pemerataan penduduk dalam suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat kepadatan penduduk dapat membawa dampak positif maupun negatif. Kepadatan yang sudah pada titik jenuh, mungkin akan lebih banyak memberi dampak negatif, akibat terjadinya ketimpangan sumber daya. Permasalahan sosial dan kriminal kemungkinan akan meningkat jika tidak segera dilakukan keseimbangan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti fasilitas sosial dan ekonomi.

Pemerataan dan keseimbangan dapat juga dilakukan dengan relokasi penduduk dalam bentuk migrasi sehingga terjadi kondisi ideal dan seimbang antara penduduk dan ketersediaan sumber daya.

Gejala umum yang terjadi adalah bahwa kepadatan penduduk cenderung tinggi di daerah-daerah perkotaan. Ketersediaan fasilitas kehidupan yang lebih lengkap dan beragam serta bervariasinya lapangan pekerjaan merupakan daya tarik tersendiri yang menggiring penduduk untuk melakukan perpindahan ke pusat-pusat kota.

Penduduk yang tidak merata persebarannya perlu mendapat perhatian berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar kabupaten/kota. Oleh karena itu diharapkan adanya persebaran penduduk yang lebih merata dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya atau rendah tingkat kepadatannya.

Gambar 1.2. : Distribusi Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota, tahun 2010



Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1990-2010

Tabel 1.2 Population Density in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 1990-2010

Kabupaten/Kota Regency/City	Kepadatan Penduduk/Km ² Population Density		
	1990	2000	2010
(1)	(4)	(5)	(5)
Kulonprogo	635	633	663
Bantul	1 357	1 541	1 798
Gunungkidul	438	451	455
Sleman	1 358	1 568	1 902
Yogyakarta	12 679	12 206	11 958

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 1990-2010

Source : BPS, 1990-2010 Population Census

Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar tinggal di Kabupaten Sleman. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa persebaran penduduk Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta pada 2010 di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, sekitar 20-30persen.Sementara penduduk di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta hanya meliputi sekitar 11 persen.

Bila dilihat menurut tingkat kepadatannya, angka kepadatan tertinggi tercatat di Kota Yogyakarta, sebesar 11.958jiwa per km², yang diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Pada 2010, kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul hanya tercatat 455 jiwa per km².

Angka Ketergantungan

Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dapat dilihat pula melalui perubahan komposisi penduduk menurut umur yang digambarkan dengan semakin rendahnya proporsi penduduk yang tidak produktif yaitu penduduk berumur muda (di bawah 15 tahun) dan lanjut usia (65 tahun keatas) dibandingkan penduduk yang produktif (15-64 tahun). Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi. Dengan angka ketergantungan ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Tabel 1.3 mencatat bahwa pada 2010 Angka Beban Ketergantungan/*Dependency Ratio* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 46. Artinya secara rata-rata setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 46 penduduk tidak produktif atau setiap 1 orang usia tidak produktif akan ditanggung oleh sekitar 2 orang usia produktif. Namun hal ini dengan asumsi bahwa setiap usia produktif

Pada tahun 2010, rata-rata setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 46 penduduk tidak produktif.

betul-betul dapat produktif. Jika tidak, tentu akan lebih berat lagi beban tanggungan usia produktif yang juga harus menanggung usia produktif lainnya. Bahkan, usia produktif yang tidak dapat diberdayakan untuk betul-betul produktif secara ekonomi (pengangguran) akan menimbulkan masalah yang cukup serius dalam kehidupan sosial.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010 (Persen)
 Table 1.3 Composition of Population and Dependency Ratio in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010 (Percent)

Tahun/Year	Umur/Age			Jumlah/ Total	Angka Beban Tanggungan/ Dependency Ratio
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	18,37	72,40	9,23	100,00	38
2009	21,64	67,87	10,50	100,00	47
2010	21,99	68,49	9,51	100,00	46

Sumber : BPS, Susenas 2008-2009, dan Sensus 2010

Source : BPS, 2008, 2009 National Socio Economic Survey and 2010 Population Census

Status Perkawinan

Status perkawinan secara demografi merupakan faktor antara dalam penghitungan fertilitas, khususnya status perkawinan pada penduduk perempuan. Selain itu, status perkawinan juga dapat mencerminkan kestabilan status penduduk dalam membentuk rumah tangga. Untuk melihat stabil tidaknya ketahanan rumah tangga, dapat dicermati dari status cerai hidup. Makin tinggi status cerai hidup, maka kualitas ketahanan rumah tangga relatif makin rendah.

Dibanding 2009, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 terdapat 1,40 persen penduduk usia 10 tahun keatas berstatus cerai hidup yang sebelumnya

mencapai 1,78 persen atau turun sekitar 0,38 point (lihat tabel 1.4).

Penurunan ini dapat diartikan bahwa ketahanan rumah tangga di provinsi ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008- 2010

Table 1.4 Percentage of Population 10 Years Old and Over by Sex and Marital Status in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010

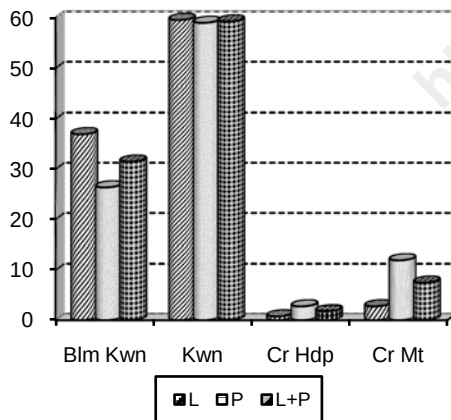
Jenis Kelamin/ Sex	Status Perkawinan/Marital Status				Jumlah/ Total
	Belum kawin/ Single	Kawin/Married	Cerai Hidup/ Divorced	Cerai Mati/ Widowed	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008					
Laki-laki/Male	37,16	59,60	0,57	2,67	100,00
Perempuan/Female	27,44	59,23	2,14	11,20	100,00
Laki-laki+Perempuan/ Male+Female	32,24	59,41	1,37	6,98	100,00
2009					
Laki-laki/Male	36,92	59,57	0,75	2,76	100,00
Perempuan/Female	26,33	58,99	2,75	11,93	100,00
Laki-laki+Perempuan/ Male+Female	31,47	59,27	1,78	7,49	100,00
2010					
Laki-laki/Male	37,15	59,57	0,74	2,54	100,00
Perempuan/Female	28,18	58,79	2,04	10,99	100,00
Laki-laki+Perempuan/ Male+Female	32,58	59,17	1,40	6,84	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2008-2009, dan Sensus Penduduk 2010

Source : BPS, 2008, 2009 National Socio Economic Survey, and 2010 Population Census

Jika dilihat pada status cerai mati, penduduk perempuan dengan status ini selalu lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki, seperti terlihat dari data 3 tahun berturut-turut (2008-2010). Hal ini mencerminkan bahwa perempuan lebih dapat bertahan dengan status jandanya (janda cerai mati) dibanding

Gambar 1.3. : Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2010



laki-laki. Ketika laki-laki ditinggal mati oleh pasangannya, kemungkinan untuk menikah lagi akan lebih besar, dan mungkin ini juga yang menyebabkan lebih tingginya persentase laki-laki dengan status kawin dibanding perempuan.

Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama wanita sangat mempengaruhi tingkat fertilitas dan perkembangan jumlah penduduk. Makin muda usia perkawinan memberi peluang untuk memperpanjang masa reproduksi dan hal ini akan menjadikan tingkat kelahiran semakin tinggi. Semakin tinggi usiaperkawinan pertama akan mempersingkat masa reproduksi wanita.

Usiaperkawinan pertama yang terlalu muda maupun terlalu tua akan memberi resiko tinggi bagi wanita itu sendiri. Kondisi fisik ketika mengandung dan melahirkan yang tidak ideal berakibat buruk bagi ibu dan anak yang dilahirkan.Usia perkawinan pertama bagi wanita yang dianjurkan menurut kesehatan yaitu antara 20-30 tahun.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke atas menurut Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008 – 2010

Table 1.5 *Percentage of Ever Marriage Women Aged 10 Years and Above by Age at First Married in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 – 2010*

Tahun/Year	Umur Perkawinan Pertama/ Age at First Married				Jumlah/ Total
	≤16	17-18	19-24	25 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	11,04	18,86	48,85	21,25	100,00
2009	8,74	19,44	51,26	20,56	100,00
2010	10,81	18,36	50,01	20,82	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2008, 2009, 2010

Source : BPS, 2008,2009, 2010 National Socio Economic Survey

Berdasarkan hasil Susenas seperti pada Tabel 1.5 terlihat bahwa pada tahun 2010 persentase wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang atau sama dengan 16 tahun walaupun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 8,74 persen wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang atau sama dengan 16 tahun dan pada tahun 2010 naik menjadi 10,81 persen. Persentase wanita pernah kawin dengan usia perkawinan pertama usia 17-18 tahun dan 19-24 tahun mengalami penurunan pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 usia perkawinan pertama pada kelompok usia 25 tahun keatas mengalami kenaikan menjadi 20,82 persen dari sebelumnya 20,56 persen pada tahun 2009, yang berarti selama periode 2009-2010 menunjukkan kecenderungan wanita untuk menunda perkawinannya.

Dengan memberi kesempatan pada wanita untuk bersekolah lebih tinggi dan memperluas kesempatan kerja, diharapkan dapat membantu menunda usia perkawinan pertama bagi seorang wanita dan pada akhirnya dapat menekan tingkat kelahiran.

Bab 2 *Kesehatan* *Health*

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien, agar semua lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai masyarakat yang lebih baik.

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini dianggap telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih banyak dijumpai berbagai masalah dan hambatan. Reformasi yang telah dilakukan di bidang kesehatan dimulai dengan dicanangkannya Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, yang merupakan Visi Pembangunan Kesehatan. Target yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan tersebut adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia

Banyak indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk. Beberapa indikator utama yang sering digunakan antara lain Angka Kematian Bayi (AKB, *Infant Mortality Rate, IMR*) dan Angka Harapan Hidup (AHH, *Expectation of Life at Birth*). Beberapa indikator juga dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat kondisi kesehatan masyarakat seperti kondisi persalinan, pola pemberian asi,

imunisasi, pemanfaatan fasilitas kesehatan dan angka kesakitan (*morbidity rate*).

Derajat Kesehatan Masyarakat.

Dari tahun ke tahun derajat kesehatan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup.

Angka kematian bayi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025 terjadi penurunan angka kematian bayi dari 14,3 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 11,8 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Pada tahun rujukan 2007 angka ini turun menjadi 11 kematian bayi. Sebaliknya angka harapan hidup penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan mengalami sedikit kenaikan dari 74,0 tahun pada tahun 2005 menjadi 74,7 tahun pada tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2010 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 74,7 tahun.

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Table 2.1 Trends Infant Mortality Rates and Life Expectancy in Daerah Istimewa Yogyakarta Province

Indikator Derajat Kesehatan/ Health Indicators	Tahun/Year		
	SDKI 1998-2007 (2007)	Proyeksi 2000-2025 (2005)	Proyeksi 2005-2025 (2010)
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Kematian Bayi/ Infant Mortality Rate	19,0	14,3	11,8
Angka Harapan Hidup/ Life Expectancy	73,0	74,0	74,7

Catatan : Angka dalam kurung () menunjukkan tahun rujukan

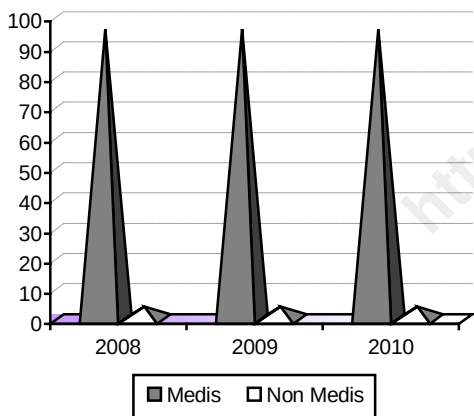
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 dan SDKI 2007

Source: BPS, Indonesia Population Projection 2000-2025 and DHS 2007

Selanjutnya bila dibandingkan antar provinsi di Pulau Jawa dan Bali, Angka Kematian Bayi (AKB) hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025 tahun rujukan 2010 di Provinsi Banten merupakan angka tertinggi, yaitu 31,1 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB terendah dicatat oleh Provinsi DKI Jakarta, yaitu 11,7 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Sementara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi kedua terendah setelah Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum dapat disimpulkan adanya kenaikan kualitas fisik atau kualitas kesehatan penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun rujukan 2007 yang ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan meningkatnya Angka Harapan Hidup. Dimensi AKB di antaranya adalah kesehatan ibu semasa hamil hingga masa nifas dan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Termasuk di dalamnya faktor penolong kelahiran.

Gambar 2.1: Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama, 2008 – 2010



Sebagian besar persalinan ditolong oleh tenaga medis, dan pada 2010 mencapai 97,22 persen

Penolong Persalinan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu semasa kehamilan. Kesehatan balita juga dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti proses kelahiran/persalinan serta kondisi lingkungan tempat tinggal.

Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis, seperti dokter atau bidan, dianggap lebih baik dibandingkan dengan proses yang ditolong dukun atau lainnya. Besaran ini dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran.

Tabel 2.2 menunjukkan persentase penolong kelahiran balita pertama, sedangkan tabel 2.3 penolong kelahiran balita yang terakhir.

Tabel 2.2 Persentase balita menurut Penolong Kelahiran Pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010
Table 2.2 Percentage of Children Under Fives by First Birth Attendant in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010

Tahun/ Year	Penolong Kelahiran/Birth Attendant				
	Dokter/ Doctor	Bidan/ Midwife	Tenaga Medis lain/ Others Medical Personnel	Dukun/ Traditional Birth Attendant	Lainnya/ Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	36,53	58,72	0,56	3,83	0,36
2009	33,86	61,83	0,21	3,93	0,17
2010	36,97	59,24	1,01	2,29	0,49

Sumber : BPS, Susenas 2008, 2009, 2010

Source : BPS, 2008, 2009, 2010 National Socio Economic Survey

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan tabel 2.2 sebagian besar proses persalinan ditolong oleh bidan, kemudian oleh dokter. Pada 2010 persentase persalinan pertama yang ditolong oleh tenaga terdidik (medis) mencapai 97,22 persen dari jumlah seluruh persalinan. Sedangkan persalinan yang ditolong dengan tenaga non medis (dukun dan lainnya) sekitar 2,78 persen.

Demikian pula berdasarkan tabel 2.3, pada umumnya proses persalinan terakhir juga banyak ditolong oleh tenaga terdidik. Pada 2010 persentase persalinan terakhir yang ditolong tenaga terdidik mencakup 98,04 persen dari jumlah seluruh persalinan. Lebih lanjut, proses persalinan oleh tenaga non medis (dukun dan lainnya) hanya sekitar 1,96 persen.

Tabel 2.3 Persentase balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010
 Table 2.3 Percentage of Children Under Fives by First Birth Attendant in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010

Tahun/ Year	Penolong Kelahiran/Birth Attendant				
	Dokter/ Doctor	Bidan/ Midwife	Tenaga Medis lain/ Others Medical Personnel	Dukun/ Traditional Birth Attendant	Lainnya/ Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	33,20	63,55	0,24	2,65	0,36
2009	36,86	60,08	0,00	2,95	0,11
2010	39,34	56,73	1,97	1,89	0,07

Sumber : BPS, Susenas 2008, 2009, 2010

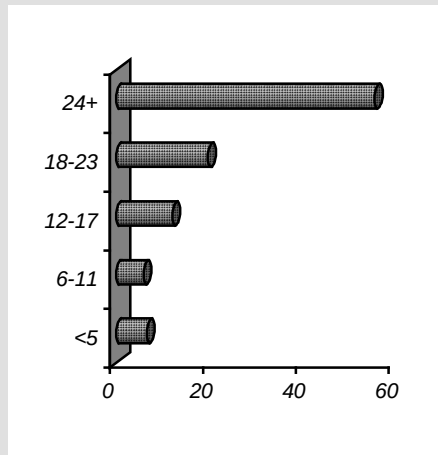
Source : BPS, 2008, 2009, 2010 National Socio Economic Survey

Apabila dikaitkan penolong kelahiran pertama dan terakhir (tabel 2.2 dan tabel 2.3) terlihat bahwa persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik secara umum cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama saat kelahiran dimana resiko kematian amat tinggi.

Pada tahun 2009, persentase penolong kelahiran pertama oleh tenaga terdidik mencapai 95,90 persen, sementara pada tahun 2010 meningkat menjadi 97,22 persen. Begitu pula persentase penolong kelahiran terakhir oleh tenaga terdidik pada tahun 2009 mencapai 96,94 persen dan pada tahun 2010 naik menjadi 98,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kelahiran balita mula-mula ditolong oleh tenaga bukan medis kemudian penanganan selanjutnya dilakukan oleh tenaga medis. Dengan semakin kecilnya persentase balita yang lahir dibantu dukun dan lainnya menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting kesehatan pada awal kelahiran.

Air Susu Ibu

Gambar 2.2: Persentase balita usia 2-4 tahun menurut lamanya disusui, 2010



Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena selain mengandung nilai gizi yang tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Manfaat lain yang diperoleh dari pemberian ASI diantaranya dapat menumbuhkan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dan anak. Makin lama pemberian ASI cenderung akan membuat daya tahan tubuh anak balitanya semakin baik.

Tabel 2.4 Persentase Balita Usia 2-4 tahun menurut lamanya disusui di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008 – 2010

Table 2.4 Percentage of Children Under Fives (2-4 years) by Duration of Breast Feeding (Month) in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010

Tahun/ Year	Lamanya Disusui (bulan)/ Duration of Breast Feeding (month)				
	≤5	6-11	12-17	18-23	24 ⁺
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	5,61	5,98	10,94	19,69	57,77
2009	5,97	4,20	15,78	20,35	53,71
2010	6,59	5,91	12,08	19,76	55,66

Sumber : BPS, Susenas , 2008-2010

Source : BPS, 2008-2010 National Socio Economic Survey

Tabel 2.4 menunjukkan distribusi balita berumur 2-4 tahun menurut lamanya disusui yang terbagi dalam 5 kelompok.

Rata-rata lama pemberian ASI balita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi. Pada tahun 2010, dari populasi balita berusia 2-4 tahun yang disusui lebih dari 24 bulan persentasenya sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2009, yaitu menjadi sebanyak 55,66 persen. Sementara yang disusui kurang dari 5 bulan jumlahnya sedikit mengalami kenaikan menjadi 6,59 persen.

Imunisasi

Disamping pemberian ASI, imunisasi juga sangat berperan dalam membentuk ketahanan tubuh anak dari serangan penyakit. Semakin lengkap imunisasi yang diberikan maka semakin kecil peluang balita untuk terserang penyakit. Ada banyak macam jenis imunisasi yang dapat diberikan pada anak balita, namun dalam Susenas 2010 yang dicakup adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B.

Tabel 2.5 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010

Table 2.5 Percentage of Children Under 5 Years had vaccinated by Sex and Vaccines in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010

Jenis Kelamin/ Sex		Jenis Imunisasi / Vaccines				
		BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
2008	Laki-laki/Male	99,16	93,87	93,41	83,34	96,25
	Perempuan/Female	98,81	95,84	94,25	85,48	96,02
	Laki-laki+Perempuan/ Male+Female	98,99	94,80	93,81	84,35	96,14
2009	Laki-laki/Male	99,42	97,07	97,30	84,45	96,30
	Perempuan/Female	99,00	96,18	96,73	82,79	94,88
	Laki-laki+Perempuan/ .Male/Female	99,21	96,62	97,01	83,61	95,58
2010	Laki-laki/Male	97,10	92,51	93,52	80,92	93,99
	Perempuan/Female	98,18	94,45	94,39	83,90	95,69
	Laki-laki+Perempuan/ .Male/Female	97,62	93,45	93,94	82,36	94,81

Sumber : BPS, Susenas 2008- 2010

Source : BPS ,2008-2010 National Socio Economic Survey

Pada 2010, hampir seluruh (93 persen lebih) balita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mendapat imunisasi BCG, DPT, Polio dan Hepatitis B. Namun untuk vaksin Campak baru mencapai sekitar 82 persen balita. Hal ini mungkin berkaitan dengan sosialisasi untuk vaksin campak masih belum segencar vaksin lainnya. Walaupun demikian, angka ini termasuk dalam kategori imunisasi dengan cakupan baik (di atas 80 persen).

Tabel 2.5 juga memberi gambaran bahwa antara balita laki-laki maupun balita perempuan tidak terjadi pola khusus dalam pemberian imunisasinya. Perlakuan yang tidak membedakan jenis kelamin balita menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2010, dalam hal imunisasi tidak terjadi bias gender.

Keluhan Kesehatan

Indikator yang sering digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk antara lain angka kesakitan (*morbidity rate*). Morbiditas atau angka kesakitan adalah proporsi penduduk yang mengeluh sakit pada selang waktu tertentu. Dalam Susenas yang dilaksanakan oleh BPS, untuk melihat angka kesakitan dipergunakan pendekatan melalui keluhan kesehatan. Referensi yang digunakan dalam Susenas adalah sebulan sebelum pencacahan. Status kesehatan penduduk dapat mempengaruhi pola aktivitas yang dilakukan.

Keluhan kesehatan yang paling banyak dialami penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2010 adalah batuk dan pilek.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan yang Lalu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2010

Table 2.6 *Percentage of Population Who Had Health Complaint During the Previous Month in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010*

Keluhan Kesehatan/ Health Complaint	2008	2009	2010
(1)	(4)		
Panas / Fever	21,21	24,92	25,82
Batuk / Cough	49,84	55,68	49,34
Pilek / Flu	49,48	56,42	46,47
Asma, Sesak Nafas /Asthma, Breatless	3,86	3,83	3,76
Diare, Buang-buang Air/ Diarrhea and Vomiting	2,56	2,70	3,33
Sakit Kepala / Headache	13,65	12,66	14,14
Sakit Gigi / Tooth ache	5,13	4,42	4,00
Lainnya / Others Complaint	34,57	33,43	36,31

Sumber : BPS, Susenas 2008-2010

Source : BPS, 2008-2010 National Socio Economic Survey

Tabel 2.6 menunjukkan besarnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan. Dua jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2010 meliputi batuk (49,34 persen) dan pilek (46,47 persen).

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang disertai dengan distribusi tenaga kesehatan yang memadai, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Dalam mengatasi masalah kesehatan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus representatif, murah dan aksesnya mudah dijangkau sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan optimal.

Tabel 2.7 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008 - 2010

Table 2.7 Number of Health Facilities in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 – 2010

Fasilitas Kesehatan/ Health Facilities	Tahun/Year		
	2008	2009	2010
(1)	(3)		
Rumah Sakit/ <i>General Hospital</i>	53	60	63
Rumah Bersalin/ <i>Childbirth House</i>	47	26	71
Balai Pengobatan/ <i>Polyclinic</i>	139	177	181
Puskesmas/ <i>Public Health Centre</i>	588	580	558
Apotik/ <i>Dispensaries</i>	416	381	428
Toko Obat Berijin/ <i>Lisence of Drugstore</i>	43	368	57

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2008-2010 BPS Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Source : BPS, *DIY in Figures, 2008-2010* BPS – *Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province*

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan.

Tabel 2.8 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010
 Table 2.8 Percentage of Population Treated Outpatient by Place/Method of Medical in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010

Pada 2010, penduduk lebih menyukai untuk berobat ke praktek dokter dan Puskesmas.

Tempat Berobat/	Tahun/Year		
	2008	2009	2010
(1)	(3)	(4)	
Rumah Sakit/Hospital	15,08	15,43	15,44
Praktek Dokter/Medical Doctor	35,92	31,78	35,54
Puskesmas/Health Centre	29,03	33,45	33,92
Praktek Batra/ Medical Traditional	1,55	14,83	16,86
Petugas Kesehatan/Paramedical	16,72	1,04	1,01
Lainnya/Others	1,71	3,47	0,09

Sumber : Susenas 2008-2010

Source : 2008-2010 National Socio Economic Survey

Bagi penduduk yang berobat jalan, jenis fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi pada 2010 adalah Praktek Dokter (35,54 persen) dan Puskesmas (33,92 persen). Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya (2008 dan 2009), di mana penduduk lebih banyak memilih berobat ke praktek dokter dan Puskesmas. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan pada praktek pengobatan tradisional (Batra) menjadi 16,86 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan karena semakin mahal biaya pengobatan praktek dokter swasta sehingga memaksa mereka untuk beralih ke tempat pengobatan yang lebih murah yaitu Puskesmas dan Batra. Selain itu akses ke Puskesmas dan Batra lebih mudah dijangkau terutama oleh penduduk yang berada di pelosok pedesaan.

Bab 3 *Pendidikan* *Education*

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PPWBA) menargetkan, (i) angka partisipasi murni (APM) SD/MI sekurang-kurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008; (ii) angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs sekurang-kurangnya 95 persen pada akhir tahun 2008; dan (iii) persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 persen pada akhir tahun 2009.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 disebutkan dalam sasaran pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk

meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan serta berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

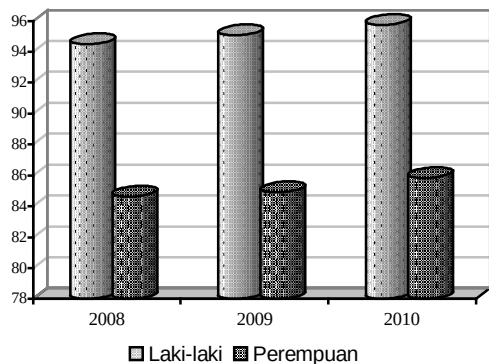
Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Sedangkan beberapa indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

Angka Melek Huruf (AMH)

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya, dimana hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis digunakan angka melek huruf (*Literacy Rate*). Kata melek huruf dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam

Gambar 3.1: Angka Melek Huruf menurut jenis kelamin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010



masyarakat yang mampu baca tulis (BPS, 2010). Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan.

Dalam SUSENAS, kemampuan baca tulis dibedakan menjadi huruf latin dan lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, huruf latin masih merupakan satu-satunya huruf yang dominan digunakan, sehingga dalam uraian ini dititik beratkan pada kemampuan baca tulis huruf latin.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Latin menurut Jenis Kelamin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008 - 2010

Table 3.1 Latin Literacy Rate by Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 - 2010

Jenis Kelamin/Sex	2008	2009	2010
(1)	(3)	(4)	
Laki-laki/Male	94,48	95,07	95,74
Perempuan/Female	84,64	84,91	85,84
L+P/Male/Female	89,46	89,77	90,66

Sumber: BPS, Susenas 2008- 2010

Source : BPS, 2008-2010 National Socio Economic Survey

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Namun pada kenyataannya pada 2010 masih ada sekitar 9,34 persen penduduk usia 15 tahun ke atas tidak dapat membaca dan atau menulis huruf latin. Ini berarti angka melek hurufnya adalah sebesar 90,66 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 91 orang yang mampu membaca dan menulis huruf latin. Sedangkan 9,34 persen

angka buta huruf, artinya dalam 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 9 orang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Umumnya angka melek huruf penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dibanding perempuan.

Dibandingkan 2009, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas pada 2009 relatif mengalami kenaikan baik pada penduduk laki-laki maupun pada penduduk perempuan. Berdasarkan data Susenas 3 tahun terakhir (2008 – 2010), AMH perempuan selalu lebih rendah dibanding AMH laki-laki.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas SDMnya yang merupakan modal dasar pembangunan bangsa.

Makin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan tentunya makin tinggi kualitas SDM nya. Artinya, peluang negara untuk mendapatkan kontribusi positif dari pendidikan bagi pembangunan juga akan semakin tinggi karena makin besarnya modal yang dimiliki penduduk untuk bersaing dalam konstelasi tenaga kerja. Meskipun ijazah yang dimiliki terkadang bukan menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin.

Dari hasil Susenas nampak bahwa tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada

**Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
mayoritas berpendidikan SLTA keatas,
baik laki-laki maupun perempuan**

umumnya berpendidikan SLTA ke atas. Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2009 maupun 2010, penduduk yang berpendidikan SLTA ke atas sudah di atas 40 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin persentase laki-laki yang berijasah SLTA ke atas lebih banyak daripada perempuan.

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan SLTA keatas pada 2010 mengalami kenaikan dibanding 2009, yaitu dari 40,37 persen menjadi 43,10 persen, baik laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya penduduk yang berpendidikan tidak/belum tamat SD maupun yang tidak/belum pernah sekolah turun baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan penduduk yang berijasah SD dan SLTP meningkat jumlahnya. Fenomena ini kemungkinan disebabkan semakin tingginya angka partisipasi sekolah pada tingkat SD dan SLTP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009 dan 2010

Table 3.2 Percentage of Population Aged 15 Years and Above by Educational Attainment and Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2009 and 2010

Tingkat Pendidikan/ Education Attainment	Laki-laki/ Male		Perempuan/ Female		L + P / M + F	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/belum pernah sekolah/Not Yet Attending School	4,43	3,19	14,29	12,81	9,58	8,12
Tidak/ belum tamat SD/Not Completed PS	8,95	6,91	8,93	7,66	8,94	7,29
SD/Primary School	21,56	21,74	21,41	21,86	21,48	21,80
SLTP/Junior High School	20,37	20,86	18,97	18,57	19,64	19,69
SLTA ke atas/Senior High School and Above	44,70	47,30	36,40	39,11	40,37	43,10

Sumber: BPS, Susenas 2009 - 2010

Source: BPS, 2009- 2010, National Socio Economic Survey

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama penduduk usia muda. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010
Table 3.3 School Participation Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010

Kelompok Umur/ <i>Age group</i>	Laki-laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	L + P / <i>M + F</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	99,59	99,80	99,69
13-15	92,26	96,04	94,02
16-18	74,69	71,30	73,06

Sumber: BPS, Susenas 2010

Source: BPS, 2009, *National Socio Economic Survey*

Dari Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi terdapat pada kelompok usia 7-12 tahun, yaitu sebesar 99,69 persen. Hal ini berarti masih ada sekitar 0,31 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa APS penduduk perempuan pada kelompok umur pendidikan dasar lebih besar dibandingkan APS penduduk laki-laki. Sedangkan

pada kelompok umur pendidikan menengah, APS perempuan lebih rendah dibandingkan APS laki-laki.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010
Table 3.4 Gross Enrollment Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010

Tingkat Pendidikan/ Education Attainment	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	L + P / M + F
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Primary School	108,48	107,84	108,16
SLTP/Junior High School	93,96	92,89	93,46
SLTA /Senior High School	81,35	77,06	79,29

Sumber: BPS, Susenas 2010

Source: BPS, 2010, National Socio Economic Survey

Berdasarkan Tabel di atas, pada 2010 APK di Provinsi D.I. Yogyakarta untuk tingkat pendidikan SD diatas 100 persen yaitu 108,16 persen. Ini berarti yang bersekolah di SD tidak hanya usia pendidikan SD (7-12 tahun) tapi juga usia di atas 12 tahun atau dibawah 7 tahun masih/sudah ada yang duduk di tingkat SD. Tapi ini tidak berarti bahwa usia 7-12 tahun sudah semua bersekolah, karena APK tidak dapat mencerminkan besaran anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, APK laki-laki maupun perempuan semakin kecil persentasenya. Hal ini bisa diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak anak yang berhenti dan tidak melanjutkan pendidikan dengan berbagai alasan.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan

Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010
Table 3.5 Net Enrollment Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010

Tingkat Pendidikan/ <i>Education Attainment</i>	Laki-laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	L + P / <i>M + F</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Primary School	93,58	95,91	94,76
SLTP/Junior High School	70,97	80,83	75,55
SLTA /Senior High School	61,06	57,51	59,35

Sumber: Susenas 2010

Source: 2010, National Socio Economic Survey

Pada 2010, di Provinsi D.I. Yogyakarta, APM SD menunjukkan angka 94,76 persen yang berarti ada sekitar 94,76 persen anak yang bersekolah di SD tepat waktu, sementara 5,24 persennya lagi mungkin sudah bersekolah di tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau mungkin juga belum bersekolah. Perlu penelusuran lebih jauh lagi dari 5,24 persen anak usia 7-12 berapa yang betul-betul belum bersekolah, dan sejumlah ini yang menjadi sasaran dinas teknis untuk mendorong mereka masuk ke bangku sekolah SD.

Seperti halnya APS dan APK, pada jenjang pendidikan dasar, APM perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Semakin tinggi jenjangnya maka APM perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan sebagai salah satu indikator input merupakan kekuatan awal dalam membangun kualitas SDM di bidang pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi proses belajar yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi output pendidikan. Ketersediaan guru atau kelas

Kebutuhan guru terhadap murid dan daya dukung kelas terhadap murid dari tahun ketahun masih cukup memadai

yang ideal untuk menangani sejumlah siswa tentu akan memacu kualitas keluaran yang maksimal. Sebaliknya, ketersediaan yang tidak mencukupi akan memberikan kualitas hasil didik yang mungkin dibawah standar.

Tabel 3.6 menggambarkan beban kerja guru serta kepadatan kelas pada suatu jenjang pendidikan. Rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SD, SLTP, maupun SLTA, masih memenuhi persyaratan bagi seorang guru untuk bisa mengawasi dan memberi perhatian kepada murid sehingga mutu pengajaran tetap berjalan dengan baik.

Pada 2010/2011 rasio murid-guru SD, SLTP, dan SLTA masing-masing 13, 20, dan 9, serta rata-rata jumlah murid di tiap jenjang pendidikan sebesar 21, 27, dan 29 murid per kelas.

Tabel 3.6 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009/2010 dan 2010/2011
Table 3.6 Trends in Pupil-Teacher Ratio and Pupil- Classroom Ratio in D.I. Yogyakarta Province, 2009/2010 and 2010/2011

Rasio/Ratio Tahun/Years	Jenjang Pendidikan/ Education Attainment		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Murid-Guru/ Pupil-Teacher</i>			
2009/2010	16	20	19
2010/2011	13	20	9
<i>Murid-Kelas/Pupil-Classroom</i>			
2009/2010	22	30	29
2010/2011	21	27	29

Sumber: Dinas Pendidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Source: Education Services, Daerah Istimewa Yogyakarta Province

Bab 4 *Angkatan Kerja* *Labour Force*

Penduduk yang terus bertambah dengan cepat akan berpengaruh pada jumlah angkatan kerja. Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja, namun besarnya penawaran tersebut kurang disertai dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja. Sehingga sejumlah besar angkatan kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar ini menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar luas yaitu: pengangguran, meledaknya sektor informal dan setengah pengangguran (Sigit, 2000).

Masalah serius dalam ketenagakerjaan meliputi pengangguran, setengah pengangguran dan rendahnya kualitas tingkat hidup pekerja. Masalah ini sudah lama menjadi masalah serius dan tidak pernah berkurang selama 40 tahun pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan ketika terjadi “Keajaiban Ekonomi” (ekonomi tumbuh cepat dalam tahun sembilan-puluhan) struktur ekonomi yang timpang cenderung kurang membaik.

Oleh karena itu pemanfaatan SDM sebagai suatu manifestasi dari kualitas SDM lebih sering dilihat dalam dimensi tenaga kerja. Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat masuk ke pasar kerja.

Pada bab ini disajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pengangguran Terbuka, Lapangan Usaha, dan Status Pekerjaan.

Pada 2010 terjadi penurunan TPAK dan TPT

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (biasanya disebut sebagai penduduk usia kerja) yang masuk dalam pasar kerja baik yang bekerja maupun masih menganggur, yang biasa disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dengan TPAK maka akan dapat dilihat besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara serta dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja juga terus bertambah. Sementara tumbuhnya lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan pertambahan angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas), terutama tenaga kerja yang baru (*new entrance*).

Pada 2010 terjadi penurunan TPAK dibanding 2009, meski relatif kecil yaitu dari 70,23 menjadi 69,76. Penurunan ini ternyata disebabkan karena penurunan TPAK di kelompok laki-laki, sedangkan pada kelompok perempuan justru mengalami peningkatan. Namun demikian penurunan ataupun peningkatan TPAK

belum dapat secara langsung menggambarkan kondisi baik buruknya tenaga kerja di suatu wilayah. Penurunan TPAK seperti yang

ditunjukkan oleh tabel 4.1, perlu ditelusuri lebih jauh lagi, apakah lebih dipengaruhi oleh tingkat pengangguran ataukah oleh tingkat penyerapan tenaga kerja (penduduk yang bekerja) untuk kurun waktu tersebut.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini sesuai dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009 - 2010
Table 4.1 Labor Force Participation Rate in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2009 – 2010

Jenis Kelamin/Sex	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Laki-laki/Male	80,26	78,62
Perempuan/Female	60,19	61,35
L+P/Male/Female	70,23	69,76

Sumber: Sakernas 2009-2010 (Agustus)

Source: National Labour Force Surveys 2009-2010 (August)

Pengangguran Terbuka

Menganggur adalah kondisi dimana seseorang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT

memberikan indikator besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT

merupakan perbandingan antara banyaknya pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

Naiknya tingkat pengangguran terbuka dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau dapat juga berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tabel 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009 - 2010

Table 4.2 Open Unemployment Rate in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2009 - 2010

Jenis Kelamin/Sex	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Laki-laki/Male	6,72	6,19
Perempuan/Female	5,05	5,08
L+P/Male/Female	6,00	5,69

Sumber: Sakernas 2009-2010 (Agustus)

Source: National Labour Force Surveys 2009-2010 (August)

Dari 2009 ke 2010 TPT mengalami penurunan yaitu dari 6,00 menjadi 5,69.

Penurunan angka pengangguran terbuka ini dapat diartikan bahwa daya serap tenaga kerja relatif mengalami peningkatan lebih besar dibanding peningkatan angkatan kerja. Kondisi ini akan memberikan pengaruh yang baik pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Lapangan Usaha

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Semakin besar proporsi pekerja di sektor primer (pertanian) maka semakin tinggi 'under utilities' pekerja,

karena sektor pertanian di Indonesia masih merupakan sektor dengan produktivitas rendah.

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa tiga sektor yang cukup dominan dalam menyerap tenaga kerja meliputi Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Jasa. Sektor Pertanian tetap merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009-2010

Table 4.3 Percentage of Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Weeks by Main Industry in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2009-2010

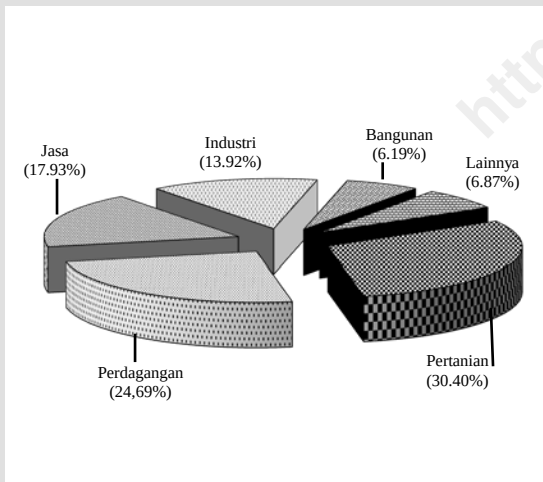
Lapangan Usaha Utama/ Main Industry	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Pertanian/ Agriculture	30,10	30,40
Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	0,95	0,79
Industri/ Manufacturing Industry	12,51	13,92
Listrik, Gas dan Air Minum/ Electricity, Gas, and Water	0,14	0,10
Bangunan/ Construction	7,67	6,19
Perdagangan, rumah makan, dan hotel/ Trade, Restaurant, and Hotel	24,02	24,69
Transportasi & Komunikasi/ Transportation & Communication	4,36	3,80
Kuangan/ Financing	2,56	2,18
Jasa/ Services	17,69	17,93
Jumlah/ Total	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2009 – 2010 (Agustus)

Source: National Labour Force Surveys 2009 – 2010 (August)

Kontribusi sektor pertanian selalu menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada 2010 banyak nyatan tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian bahkan mencapai 30,40 persen.

Gambar 4.2: Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, 2010



Sektor pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih merupakan pertanian tradisional, jadi kecenderungannya masih bersifat padat karya. Banyaknya pekerja di sektor ini diduga tidak memberikan produksi pertanian sebanyak yang diharapkan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata berpengaruh terhadap perkembangan sektor perdagangan jasa yang ditunjukkan oleh besarnya persentase penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut, masing-masing sebesar 24,69 persen dan 17,93 persen.

Status Pekerjaan

Indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2009 maupun 2010, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu terakhir berstatus buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2010 yang berstatus buruh/karyawan/pegawai mencapai 30,57 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 32,44 persen.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009-2010

Table 4.4 Percentage of Population 15 Years Olds and Over Who Worked During The Previous Weeks by Employment Status in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2009-2010

Status pekerjaan utama/ Employment Status	2009	2010
(1)	(2)	(3)

BerusahaSendiri <i>Self Employed</i>	14,33	13,75
BerusahadibantuBuruhTidakTetap/Buruh TidakDibayar <i>Employed Assisted by Temporary</i>	23,81	24,35
BerusahadibantuBuruhTetap <i>Employed Assisted by Employer</i>	2,96	3,90
Buruh/Karyawan/Pegawai <i>Paid Worker</i>	32,44	30,57
PekerjaBebas di Pertanian <i>Self Employed in Agriculture</i>	2,89	2,02
PekerjaBebas di Non Pertanian <i>Self Employed in Non Agriculture</i>	7,67	6,54
PekerjaKeluarga/takDibayar <i>Unpaid Worker</i>	15,90	18,87

Sumber: Sakernas 2009 –2010 (Agustus)

Source: National Labour Force Surveys 2009 – 2010 (August)

Bab 5 *Taraf & Pola Konsumsi*

Consumption Level & Pattern

Kondisi sosial ekonomi masyarakat lebih reflektif jika dilihat dari tingkat penghasilan rumah tangga. Namun dalam operasionalnya di lapangan, untuk mendapatkan data penghasilan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Keterbukaan dan kesediaan rumah tangga sendiri untuk memberikan informasi yang sesungguhnya masih dirasa kurang kooperatif. Untuk itulah digunakan pendekatan konsumsi (*consumption approach*) untuk melihat tingkat penghasilan rumah tangga.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat adalah jumlah dan persentase penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk yang meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin memberi indikasi menurunnya pendapatan penduduk.

Indikator lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara kelompok penduduk, dan bagaimana pola keterbandingan konsumsi makanan dan non makanan dalam rumah tangga.

Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai sejumlah nilai rupiah yang

Pada 2010, sebanyak 16,83 persen penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta hidup dibawah garis kemiskinan

diperlukan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang paling esensial yang terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya.

Penduduk miskin relatif lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan dari pada yang tinggal di perkotaan. Pada 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan 16,83 persen penduduk miskin yang terdistribusi di wilayah pedesaan sebanyak 21,95 persen, sedangkan di wilayah perkotaan hanya 13,98 persen.

Tabel 5.1: Persentase Penduduk menurut Tipe Daerah dan Status Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010

Table 5.1: Percentage of Population by Type of Place and Social Status in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010

Tipe Daerah <i>Type of Place</i>	Status Sosial <i>Social Status</i>	
	Penduduk Tidak Miskin <i>Not Poor</i>	Penduduk Miskin <i>Poor</i>
(1)	(2)	(3)
Kota/ <i>Urban</i>	86,02	13,98
Desa/ <i>Rural</i>	78,05	21,95
Kota+Desa/ <i>Urban+Rural</i>	83,17	16,83

Sumber: Susenas 2010 (Panel Maret)

Source : 2010, National Socio Economic Survey (Panel March)

Ketimpangan distribusi pendapatan yang berkepanjangan selain menciptakan kemiskinan, dapat pula menimbulkan masalah sosial

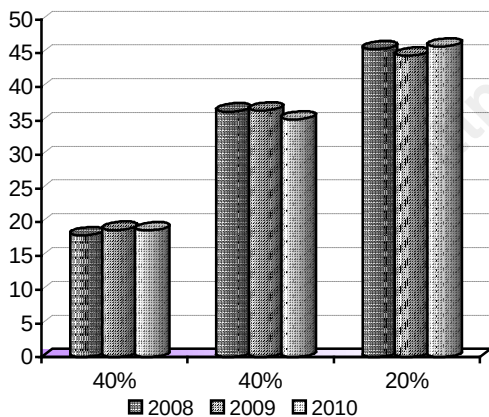
Perkembangan Distribusi Pendapatan

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan secara makro, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatannya.

Ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya akan menciptakan kemiskinan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah kesenjangan sosial. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk mencapai target tingkat pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan pemerataan bagi masyarakat.

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dapat digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama 2008-2010 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk cenderung meningkat.

Gambar 5.1: Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Penduduk 2008-2010



Kesimpulan yang sama, ditunjukkan oleh angka koefisien Gini, yang menurun sedikit dari 0,3112 menjadi 0,3088. Indikator Gini (*Gini Ratio*), dengan nilai koefisien berkisar antara 0-1 merupakan indikator yang sering digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Semakin mendekati 0 dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya apabila semakin mendekati angka 1 dikatakan tingkat ketimpangan pengeluaran tinggi/sempurna.

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa meningkatnya porsi pengeluaran penduduk berpendapatan rendah diikuti dengan menurunnya koefisien gini, yaitu dari 0,3112 pada 2009, turun menjadi 0,3088 pada 2010. Fenomena ini menunjukkan semakin berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok penduduk. Untuk negara berkembang, koefisien gini berkisar antara 0,3000 sampai dengan 0,4000 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Tabel 5.2 Persentase Pengeluaran menurut Kelompok Penduduk dan Angka Gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010
 Table 5.2 Percentage Expenditure of Several Population Groups and Coefficient Gini in Daerah Istimewa.Yogyakarta Province,2008-2010

Tahun/ Year	40% terendah/ Low	40% menengah/ Middle	20% tertinggi/ Hight	Angka Gini/ Gini Coefficient
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	18,05	36,37	45,59	0,3264
2009	18,85	36,50	44,65	0,3112
2010	18,77	35,22	46,02	0,3088

Sunber : Susenas 2008-2010 (Juli)

Source : 2008- 2010 National Socio Economic Survey (July)

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Di negara berkembang secara umum penduduknya berpendapatan rendah, dan proporsi pengeluaran untuk makanan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju, yaitu mencapai lebih dari 50 persen dari seluruh pengeluaran.

Tabel 5.3 Persentase Pengeluaran per Kapita sebulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008 - 2010

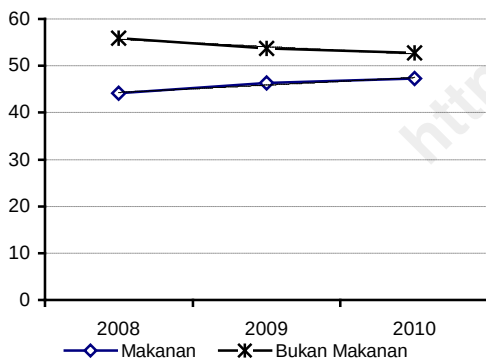
Table 5.3 Monthly Expenditure per Capita by Food and Non-Food Group in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2007 – 2009

Tahun/ Year	Makanan/ Food	Bukan Makanan/ Non Food
(1)	(2)	(3)
2008	44,10	55,90
2009	46,34	53,66
2010	47,27	52,73

Sunber : Susenas 2008-2010 (Juli)

Source : 2008- 2010 National Socio Economic Survey(July)

Gambar 5.2: Persentase Pengeluaran Perkapita sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Prov. D.I. Yogyakarta, 2008 -2010



Pada Tabel 5.3 terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada 2010 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan keadaan pada 2009. Sebaliknya pada 2010 persentase pengeluaran untuk makanan sedikit mengalami kenaikan yaitu dari 46,34 persen pada tahun 2009 menjadi 47,27 persen pada tahun 2010.

Tabel 5,4 Komposisi Pengeluaran per Kapita sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008 - 2010

Table 5,4 *Composition of Consumption Expenditure per Capita per Month in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 and 2010*

Komposisi/Composition	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	
1. Padi-padian/Cereals	4,82	6,41	6,56
2. Umbi - umbian/Tubers	0,30	0,34	0,28
3. Ikan/Fish	1,15	1,45	1,37
4. Daging/Meat	1,38	1,84	1,84
5. Telur dan Susu/Egg and milk	3,25	4,06	3,83
6. Sayur-sayuran/Vegetables	2,83	3,63	4,11
7. Kacang-Kacangan/Legumes	1,57	2,24	1,98
8. Buah-buahan/Fruit	2,07	2,31	2,10
9. Minyak/Lemak/Oil and fats	1,99	1,52	1,46
10. Bahan minuman/Beverage flavour stuffs	1,76	2,11	2,15
11. Bumbu-Bumbuan/Spices	0,65	0,70	0,75
12. Konsumsi Lainnya/Miscellaneous food items	1,13	1,51	1,37
13. Makanan & Minuman Jadi/Prepared food	17,85	14,34	15,37
14. Tembakau dan sirih/ Tobacco and betel	3,37	3,87	4,08
Jumlah Makanan/Total of Food	44,10	46,34	47,27

Sumber : Susenas , 2008-2010 (Juli)

Source : 2008-2010, National Socio Economic Survey (July)

Persentase pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi menunjukkan angka tertinggi

Pengeluaran konsumsi makanan penduduk per kapita sebulan menurut jenis kelompok komoditi mempunyai pola yang hampir sama dari tahun 2009 ke tahun 2010. Pengeluaran

penduduk terbesar dialokasikan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi, kemudian padi-padian. Walaupun memiliki pola yang hampir sama tetapi porsi konsumsi makanan dan minuman jadi mengalami sedikit kenaikan dari 2008 ke 2009. Demikian juga untuk konsumsi padi-padian mengalami peningkatan dari 6,41 persen pada 2009 menjadi 6,56 persen pada 2010.

Pada 2010 pengeluaran bukan makanan mencapai 52,73 persen dan pengeluaran tertinggi pada aneka barang dan jasa yaitu 21,67 persen

Pada Tabel 5.5 jumlah pengeluaran kelompok bukan makanan pada 2010 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 53,66 persen tahun 2009 menjadi 52,73 persen pada 2010. Persentase pengeluaran terbesar dari kelompok bukan makanan adalah aneka barang dan jasa diikuti kelompok perumahan.

Tabel 5,5 Komposisi Pengeluaran per Kapita sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008 - 2010

Table 5,5 Composition of Consumption Expenditure per Capita per Month in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 - 2010

Komposisi/Composition	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	
Perumahan/ Housing	20,54	22,06	20,70
Barang dan Jasa/ Miscellaneous Good and service	21,65	22,20	21,67
Pakaian, Alas kaki & tutup kepala/ Cloting, footwear & headger	3,16	2,65	2,61
Barang Tahan lama/ Durable Goods	7,69	3,63	4,61
Pajak dan Asuransi/ Taxes and Insurances	1,75	2,07	2,34
Keperluan Pesta dan upacara/ Parties and ceremonies	1,11	1,05	0,79
Jumlah bukan makanan/ Total of Non Food	55,90	53,66	52,73

Sumber : Susenas , 2008-2010 (Juli)

Source : 2008-2010, National Socio Economic Survey (July)

Perkiraan Produksi Pertanian

Pertanian merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha

pertanian yang dilakukan antara lain adalah pertanian tanaman pangan, seperti beras dan jagung yang merupakan kebutuhan pokok penduduk.

Tabel 5,6 Produksi Beras dan Jagung per Kapita per Tahun (Kuintal) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008 - 2010
Table 5,6 Annually Product of Rice and Maize per Capita (Quintal) in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 - 2010

Uraian/ Explanation	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	
Beras/Rice	5 044 826	5 257 173	5 169 067
Jagung/Maize	2 853 720	3 149 370	3 455 760
Penduduk/Population*	3 468 502	3 501 869	3 457 491
Per kapita/Percapita			
Beras/Rice	1,45	1,50	1,49
Jagung/Maize	0,82	0,90	0,99

Sumber : BPS, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2010
 Source : BPS, Daerah Istimewa Yogyakarta Province in figure 2009
 Ket,/ Note: *) Estimasi BPS / BPS Estimation

Produksi beras pada tahun 2010 sedikit mengalami penurunan sebesar 1,68 persen dibandingkan 2009, yaitu dari 5.257.173 kuintal menjadi 5.169.067 kuintal, sementara produksi jagung mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 3.149.370 kuintal menjadi 3.455.760 kuintal atau naik sekitar 9,73 persen.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penyediaan per kapita beras tahun 2010 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 1,50 kuintal menjadi 1,49 kuintal beras per kapita. Sementara untuk komoditas jagung juga mengalami kenaikan dari 0,90 kuintal perkapita menjadi 0,99 kuintal per kapita.

Bab 6 *Perumahan & Permukiman*

Housing & Settlement

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah mendapatkan rumah dan lingkungan yang sehat dan nyaman. Perumahan dalam konteks yang lebih luas disebut permukiman, yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga beserta berbagai fasilitas pendukungnya. Perumahan menjadi tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi, perlindungan dari gangguan, dan fungsi lainnya bagi penghuninya. Rumah selain sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, rumah juga sebagai sarana pembinaan keluarga. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status sosial dari pemiliknya. Sebagai sarana pembinaan keluarga, rumah diharapkan mampu menghasilkan hasil yang maksimal yaitu tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rumah selain sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, rumah juga sebagai sarana pembinaan keluarga.

Menurut Krieger and Higgins (2002), selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu, pengadaan perumahan merupakan tujuan fundamental yang kompleks dan tersedianya standar perumahan adalah isu penting dari kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan, sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait, seperti tersedianya fasilitas penerangan, sumber air minum, tersedianya jamban, dan lantai yang memenuhi standar kesehatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelengkapan fasilitas pokok/standar tempat tinggal merupakan sebagian faktor penentu kenyamanan dan kesehatan suatu tempat tinggal. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut pada gilirannya akan menentukan kualitas tempat tinggal tersebut. Fasilitas pokok tersebut antara lain tersedianya fasilitas penerangan, sumber air minum, tersedianya jamban, dan lantai bukan tanah sebagai jenis lantai utama yang memenuhi standar kesehatan.

Sumber Penerangan

Pada 2010, jumlah pengguna listrik untuk rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 3,20 persen dibandingkan keadaan 2009. Bagi pelanggan rumah tangga, listrik PLN umumnya digunakan untuk penerangan.

Tabel 6.1 Banyaknya Pelanggan Listrik, Listrik yang Diproduksi dan Terjual di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010
Table 6.1 Number Consumer Electricity, Electricity Generated and Sold in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 – 2010

Tahun/ Year	Pengguna Listrik untuk RT <i>Consumer Electricity (Pelanggan)</i>	Listrik yang diproduksi/ <i>Electricity Producted (KWH)</i>	Listrik yang dijual/ <i>Electricity by Sales (KWH)</i>
(1)	(5)	(2)	(4)
2008	717.270	1 733 410 946	1 578 453 018
2009	736.968	1 866 766 573	1 705 941 481
2010	760.554	1 975 726 468	1 809 022 224

Sumber : PLN Wil. XIII, Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
 Source : *Government Electricity Company for Area XIII Distribution of Yogyakarta Subdivision*

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan listrik, pemerintah melalui PLN terus meningkatkan produksinya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya listrik yang diproduksi dan terjual dari

tahun ke tahun. Pada 2010 banyaknya listrik yang diproduksi mencapai 1.975.726.468 kwh, sementara listrik yang dijual meliputi 1.809.022.224 kwh.

Berdasarkan Tabel 6.1, banyaknya listrik yang terjual selama 3 tahun selalu memperlihatkan peningkatan.

Sumber Air Minum

Tingkat kesejahteraan rakyat salah satunya dapat ditunjukkan dengan banyaknya rumahtangga yang sudah menggunakan air minum bersih di suatu daerah. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menggunakan air bersih di suatu daerah menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga di daerah tersebut.

Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih pada 2010 mengalami peningkatan sebesar 89,68 persen.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010
Table 6.2 Percentage of Household by Source of Drinking Water in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 -2009

Tahun/ Year	Sumber air minum/Source of Drinking Water					
	Air Kemasan/ Packaging Water	Ledeng/ Pipe	Pompa/ Pump	Sumur/ Mata Air Terlindung/ Protected well/Protected spring	Sumur/Mata Air Tidak Terlindung/ Unprotected well/Unprotected spring	Lainnya/ Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	14,07	10,60	14,21	48,04	10,00	3,07
2009	12,68	9,67	11,70	55,20	8,04	2,71
2010	18,22	7,03	8,12	56,32	7,01	3,31

Sumber : Susenas 2008-2010

Source : 2008-2010 National Socio Economic Survey

Air minum bersih merupakan air minum yang bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Di Provinsi D.I Yogyakarta penggunaan sumber air minum bersih

terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2010, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu dari 89,25 persen pada tahun 2009 menjadi 89,68 persen .

Jenis Lantai

Jika dilihat menurut jenis lantai terluas tempat tinggal, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2010 bertempat tinggal di dalam rumah berlantai bukan tanah (92,19 persen). Sedangkan rumah tangga dengan rumah tinggal berlantaikan tanah pada 2010 mencapai 7,81 persen, angka ini mengalami sedikit penurunan dibanding 2009 yang mencapai 9,28 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menata kembali atau membangun rumah tinggal mereka dengan lantai bukan tanah.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010

Table 6.3 Percentage of Household by primary construction material of the floor of living quarter in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 - 2010

Tahun/ Year	Jenis Lantai/ Type of floor	
	Tanah/ Earth	Bukan Tanah/ Non Earth
(1)	(2)	(3)
2008	10,54	89,46
2009	9,28	90,72
2010	7,81	92,19

Sumber : Susenas 2008- 2010

Source : 2008- 2010 National Socio Economic Survey

Tempat Pembuangan Air Besar

Berdasarkan Tabel 6.4 tercatat bahwa pada 2010 persentase rumah tangga yang menggunakan tempat pembuangan air besar jenis leher angsa menempati peringkat tertinggi yaitu 89,37 persen. Sementara rumah tangga yang menggunakan tempat pembuangan air besar jenis plengsengan 1,58 persen, cubluk/cemplung 8,82 persen dan rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas buang air besar hanya 0,23 persen.

Tabel 6.4 Persentase Rumah tangga menurut Tempat Pembuangan Air Besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010

Table 6.4 Percentage of Households by Closet Facility in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010

Tahun/ Year	Tempat Pembuangan Air Besar Closet Facility				
	Leher Angsa Swan Trine	Pleng- sengan	Cemplung/ Cubluk Pit Privy	Tidak ada None	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	82,51	2,67	14,65	0,17	100,00
2009	83,07	4,83	12,00	0,10	100,00
2010	89,37	1,58	8,82	0,23	100,00

Sumber : Susenas 2008-2010

Source : 2008-2010 National Socio Economic Survey

Semakin banyak rumah tangga yang menggunakan fasilitas jenis leher angsa, mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang lebih sehat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan jenis leher angsa dianggap sebagai tempat pembuangan air besar yang paling sehat, karena dibawahnya terdapat saluran berbentuk huruf “U” untuk menampung air sehingga bau tinja tidak bisa keluar.

Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan

Jarak penampungan kotoran yang terlalu dekat dengan sumber air minum kemungkinan besar dapat menyebabkan perembesan ke dalam sumber air minum sehingga akan mempengaruhi kualitas air untuk keperluan rumah tangga.

Banyaknya rumah tangga yang mempunyai jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran lebih dari 10 m, pada 2010 mengalami peningkatan, yaitu menjadi 77,46 persen.

Pada 2010 persentase rumah tangga yang mempunyai sumber air minum dengan jarak ke tempat penampungan kotoran kurang dari atau sama dengan 10 m tercatat sebanyak 17,88 persen, sedangkan yang mempunyai jarak lebih dari 10 m mencapai 77,46 persen rumah tangga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak rumah tangga yang mulai sadar akan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Keadaan seperti ini tentunya wajib untuk dipertahankan. Untuk jarak penampungan kotoran pada tahun 2010 yang tidak tahu atau TT ada sebesar 4,66 persen, sedangkan tahun 2009 sebanyak 8,88 persen. Maka penurunannya hampir mendekati 51 persen.

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008 - 2010

Table 6.5 Percentage of Household by Distance Between Source of Drinking Water to Septic Tank or other Toilet Discharge in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008 - 2010

Tahun/ Year	Jarak ke penampungan kotoran/ Distance to Septic Tank or Other Toilet Discharge (m)		
	< 10	≥ 10	TT
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	20,55	71,73	7,72
2009	19,00	72,12	8,88
2010	17,88	77,46	4,66

Sumber : Susenas 2008-2010

Source : 2008-2010 National Socio Economic Survey

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pembangunan perumahan yang semakin meningkat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ke depan diharapkan agar maraknya pembangunan pemukiman perumahan dengan lahan yang relatif terbatas tetap diikuti dengan perencanaan lingkungan yang teratur, sehat, dan memadai.

<http://yogyakarta.bps.go.id>

Bab 7 *Pariwisata & Keagamaan*

Tourism & Religion

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat dari tingkat kegiatan sosial dan budaya

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dapat juga dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan. Makin tinggi tingkat kunjungan wisatawan dapat memberi dampak penambahan kesejahteraan masyarakat melalui belanja dari kunjungan para wisatawan.

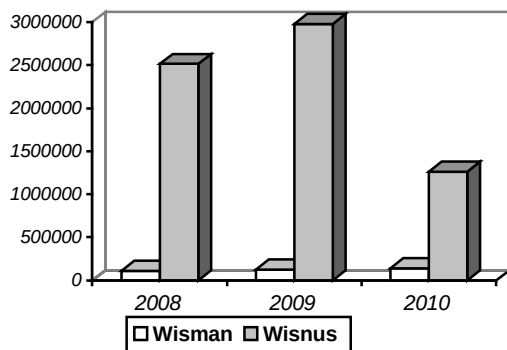
Selain itu kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kegiatan non ekonomi yang menyangkut kebutuhan spiritual seperti keagamaan. Waktu yang dimiliki tidak semata-mata untuk kegiatan mencari nafkah, akan tetapi juga harus bisa meluangkan waktu untuk kegiatan keagamaan. Khususnya pada masyarakat muslim, tingkat kesejahteraan bisa dilihat dari peningkatan jumlah jamaah haji dari waktu ke waktu.

Pariwisata

Pariwisata sebagai sektor andalan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, senantiasa diusahakan untuk dikembangkan serta ditingkatkan eksistensinya. Beberapa hal yang menunjukkan perkembangan kepariwisataan adalah, indeks wisatawan yang menginap di fasilitas penginapan seperti hotel maupun losmen. Selama 2010 jumlah wisatawan manca negara yang menginap di losmen dan hotel mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 2010.

Secara umum, banyaknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang menginap di losmen dan hotel selama 2010 mengalami penurunan yang cukup drastis sekitar 54,88 persen dengan besaran indeks 65 (2004=100). Hal ini

Gambar 7.1: Jumlah Wisatawan yang Menginap di Losmen dan Hotel, 2008-2010



kemungkinan terjadi karena adanya bencana meletusnya Gunung Merapi di akhir tahun 2010.

Tabel 7.3 Indeks Wisatawan yang Menginap di Losmen dan Hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2004 = 100), 2008-2010
Table 7.3 Index of Tourist who Spent The Night in Hotel in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010

Tahun Year	Wisman/ Foreign Tourist	Indeks/ Index	Wisnus/ Domestic Tourist	Indeks/ Index	Wisnus+ Wisman/ Dom.+ For. Tourist	Indeks/ Index
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	110 709	130	2 516 204	122	2 626 913	122
2009	123 374	145	2 981 630	145	3 105 004	103
2010	140 648	165	1 260 252	61	1 400 900	65

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010
Source : 2010, BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province

Jamaah Haji

Pembangunan kehidupan beragama bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan jemaah haji.

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya pemeluk agama Islam, serta adanya peningkatan bimbingan dan pelayanan pemerintah yang lebih baik dalam pelaksanaan ibadah haji, tercatat kenaikan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Karena biaya untuk ibadah haji ini tidak murah, maka dapat dipastikan hanya masyarakat muslim yang memiliki tingkat kesejahteraan yang mapan saja

Jumlah jemaah haji Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2010/2011 turun sebesar 2,86 persen dibandingkan 2009/2010

yang dapat menjalankan ibadah ini. Namun ada juga kasus bahwa yang menunaikan ibadah haji juga berasal dari masyarakat yang ekonominya pas-pasan.

Tabel 7.5 Banyaknya Pemeluk Agama Islam, Jemaah Haji, dan Rasio Jemaah Haji per 100.000 Penduduk Pemeluk Agama Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008/2009 - 2010/2011

Table 7.5 Number of Moslem, Haji Pilgrim, and Ratio of Haji Pilgrim per 100,000 Moslem in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008/2009 - 2010/2011

Tahun/ Year	Banyaknya/Total			Rasio per 100.000 pemeluk agama Islam/ Ratio
	Pemeluk agama Islam/ Moslem	Jemaah haji/ Haji Pilgrim		
		Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008/2009	3 264 529	1 484	1 606	94,65
2009/2010	3 255 658	1 505	1 572	95,51
2010/2011	3 271 936	1 507	1 658	96,73

Sumber : Kanwil Depag. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Source : Regional Office of Religious Affairs Department
of Daerah Istimewa Yogyakarta Province

Dari Tabel 7.5 terlihat bahwa, pada 2010/2011 ada sebanyak 3.165 jemaah haji dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau naik 2,86 persen dari tahun sebelumnya. Rasio jemaah haji per 100.000 penduduk pemeluk agama Islam pada 2010 sebesar 96,73. Artinya dari setiap 100 ribu penduduk muslim sekitar 97 penduduk menunaikan ibadah haji pada 2010. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, jumlah jemaah haji perempuan lebih banyak dibanding jumlah jemaah haji laki-laki, yaitu 1.507 berbanding 1.658 atau jemaah perempuan 10 persen lebih banyak.

**Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1971-2000**
Annual Growth Rate by Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 1971-2000

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Tahun/Year		
	1980-1990	1990-2000	2000-2010
(1)	(3)	(4)	(4)
Kulonprogo	- 0,22	- 0,04	0,48
Bantul	0,94	1,19	1,57
Gunungkidul	- 0,13	0,30	0,07
Sleman	1,43	1,50	1,90
Yogyakarta	0,34	0,39	-0,21
Daerah Istimewa Yogyakarta	0,58	0,72	1,04

Sumber: Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000, 2010

Source : 1980, 1990, 2000, 2010 Population Census

**Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan
Status Perkawinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**
*Percentage of Population 10 Years Old and Over by Regency/City
and Marital Status in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Status perkawinan/ <i>Marital Status</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
	Belum kawin/ <i>Single</i>	Kawin/ <i>Married</i>	Cerai hidup/ <i>Divorced</i>	Cerai mati/ <i>Widowed</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	26,47	63,43	1,36	8,73	100,00
Bantul	29,43	62,51	1,06	7,00	100,00
Gunungkidul	20,84	68,28	2,17	8,71	100,00
Sleman	37,68	55,34	1,15	5,82	100,00
Yogyakarta	43,56	47,71	1,08	7,64	100,00
Daerah Istimewa Yogyakarta	31,67	59,76	1,34	7,23	100,00

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Persentase Wanita Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota
dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**
*Percentage of Population Ever Marriage by Regency/City and Age
at First Marriage in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/Kota Regency/City	Umur perkawinan pertama/Age of First Marriage				Jumlah/ Total
	≤ 16	17 – 18	19 - 24	25 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	10,80	16,63	52,84	19,72	100,00
Bantul	8,62	18,93	52,31	20,14	100,00
Gunungkidul	16,24	23,99	47,17	12,60	100,00
Sleman	9,12	14,93	48,97	26,98	100,00
Yogyakarta	8,77	15,79	50,10	25,34	100,00
Daerah Istimewa Yogyakarta	10,81	18,36	50,01	20,82	100,00

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Persentase Balita menurut Kabupaten/Kota
dan Penolong Pertama Waktu Lahir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**
*Percentage of Children Under Fives by Regency/City and First of Birth Attendant
in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/Kota Regency/City	Penolong pertama waktu lahir/First of Birth Attendant				
	Dokter/ Doctor	Bidan/ Midwife	Tenaga medis lain/ Other Medical Personnel	Dukun/ Traditional Birth Attendant	Lainnya/ Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	38,71	54,27	0,00	6,32	0,70
Bantul	36,53	58,94	3,23	1,30	0,00
Gunungkidul	16,50	82,28	0,00	1,22	0,00
Sleman	46,56	48,92	0,19	3,02	1,32
Yogyakarta	45,74	53,49	0,00	0,77	0,00
Daerah Istimewa Yogyakarta	36,97	59,24	1,01	2,29	0,49

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Persentase Balita menurut Kabupaten/Kota dan
Penolong Terakhir Waktu Lahir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**
*Percentage of Children Under Fives by Regency/City and Last of Birth Attendant
in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Penolong terakhir waktu lahir/ <i>Last of Birth Attendant</i>				
	Dokter/ <i>Doctor</i>	Bidan/ <i>Midwife</i>	Tenaga medis lain/ <i>Other Medical Personnel</i>	Dukun/ <i>Traditional Birth Attendant</i>	Lainnya/ <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	39,87	55,21	0,00	4,21	0,70
Bantul	42,51	50,44	5,98	1,07	0,00
Gunungkidul	18,33	71,06	0,00	0,61	0,00
Sleman	46,28	50,05	0,66	3,02	0,00
Yogyakarta	48,06	51,16	0,00	0,77	0,00
Daerah Istimewa Yogyakarta	39,34	56,73	1,97	1,89	0,07

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010**
*Percentage of Population Treated Outpatient by Regency/City and Place
of Medical in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Praktek Dokter <i>Medical doctor</i>	Puskesmas <i>Health center</i>	Petugas Kesehatan <i>Paramedical</i>	Praktek Tradisional <i>Traditional Treatment</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Kulonprogo	7,95	18,68	20,96	15,04	0,65	1,02
Bantul	7,74	15,77	12,28	12,59	0,55	0,57
Gunungkidul	4,78	19,19	25,77	5,64	0,51	1,78
Sleman	8,65	17,36	11,72	7,02	0,49	0,86
Yogyakarta	10,13	18,42	19,21	0,79	0,66	1,05
Daerah Istimewa Yogyakarta	7,66	17,62	16,82	8,36	0,54	1,03

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**
*Percentage of Population 15 Years of Age and Over by Regency/City and Level of Educational
Attainment in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/ Kota Regency/City	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan									Jumlah Total
	Tdk/Blm Pernah Sekolah Never/ Not Yet Attended School	Tdk/Blm Tamat SD/ Not Com- plete Primary School	SD Primary School	SMTP Junior High School	SMU Senior High School	SMK Vocatio- nal Senior High School	D1/D2 Diploma I/II	D3/SM Academy Diploma III	D4/Univ Univer- sity/ Diploma IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
Kulonprogo	6,93	14,78	28,41	19,32	12,28	11,48	1,52	1,81	3,47	100,00
Bantul	6,90	12,85	24,34	18,75	16,79	10,55	0,88	2,86	6,08	100,00
Gunungkidul	16,66	13,68	31,12	20,21	10,13	4,79	0,96	0,67	1,79	100,00
Sleman	4,38	9,64	19,72	15,73	24,15	12,27	0,88	3,18	10,04	100,00
Yogyakarta	1,81	7,16	15,34	17,99	32,97	8,00	0,42	4,93	11,37	100,00
Daerah Istimewa Yogyakarta	7,42	11,56	23,62	18,06	19,18	9,79	0,92	2,65	6,81	100,00

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Persentase Penduduk 7-24 Tahun menurut Golongan Umur,
Jenis Kelamin dan Jenjang Partisipasi Bersekolah
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**
*Percentage of Population 15 Years of Age and Over by Regency/City and Level of Educational
Attainment in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Laki-laki <i>Male</i>			Perempuan <i>Female</i>			Laki-laki + Perempuan <i>Male + Female</i>		
	Belum/ Tidak Pernah Berse- kolah <i>Never/Not Yet Attended School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Berseko- lah Lagi <i>Attending School Anymore</i>	Belum/ Tidak Pernah Berse- kolah <i>Never/Not Yet Attended School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Berseko- lah Lagi <i>Attending School Anymore</i>	Belum/ Tidak Pernah Berse- kolah <i>Never/Not Yet Attended School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Berseko- lah Lagi <i>Attending School Anymore</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 – 12	0,21	99,59	0,21	0,20	99,80	0,00	0,20	99,69	0,10
13 – 15	0,00	92,26	7,74	0,00	96,04	3,96	0,00	94,02	5,98
16 – 18	0,00	74,69	25,31	0,00	71,30	28,70	0,00	73,06	26,94
19 – 24	0,19	49,45	50,36	0,00	38,17	61,83	0,10	44,03	55,87

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama
Selama Seminggu yang Lalu dan Tipe Daerah
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**

*Percentage of Population 15 Years Old and Over by Main Activity During
The Previous Weeks and Type of Place in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kegiatan utama/ Main Activity	Tipe Daerah Type of Place		
	Kota Urban	Desa Rural	Kota + Desa Urban + Rural
(1)	(2)	(3)	(4)
Bekerja/Working	62,29	70,88	65,79
Pengangguran/Unemployment	4,67	2,96	3,97
Mengurus rumah tangga/House Keeping	15,83	16,79	16,22
Sekolah/Attending School	12,96	6,57	10,36
Lainnya/Others	4,25	2,80	3,66
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2010

Source: National Labour Force Surveys in August 2010

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
 Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lau Menurut Lapangan
 Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010
*Percentage of Population 15 Years Old and Over who Worked During the Previous
 Weeks by Main Industry and Type of Place in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-laki +Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian/ <i>Agriculture</i>	28,61	32,56	30,40
Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas dan Air Minum/ <i>Mining ,Quarring, Electricity, Gas and Water</i>	1,36	0,32	0,89
Industri/ <i>Manufacturing Industry</i>	13,56	14,36	13,92
Bangunan/ <i>Construction</i>	11,08	0,32	6,19
Perdagangan, rumah makan, dan hotel/ <i>Trade, Restaurant, and Hotel</i>	19,55	30,87	24,69
Transportasi dan Komunikasi/ <i>Transportation & Communication</i>	6,01	1,13	3,80
Keuangan/ <i>Financing</i>	2,67	1,58	2,18
Jasa/ <i>Services</i>	17,16	18,87	17,93
Jumlah/ <i>Total</i>	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2010
Source: National Labour Force Surveys in August 2010

**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**

*Percentage of Population 15 Years Old and Over who Worked During
The Previous Weeks by Main Employment Status and Sex
in D.I.Yogyakarta Province, 2010*

Status pekerjaan utama/ Main Employment Status	Jenis Kelamin Sex		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri <i>Self Employed</i>	13,58	13,96	13,75
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar <i>Employed Assisted by Temporary Employee/ Unpaid Worker</i>	29,04	18,71	24,35
Berusaha dibantu Buruh Tetap <i>Employed Assisted by Employer</i>	5,42	2,07	3,90
Buruh/Karyawan/Pegawai <i>Paid Worker</i>	32,14	28,68	30,57
Pekerja Bebas di Pertanian <i>Self Employed in Agriculture</i>	1,94	2,12	2,02
Pekerja Bebas di Non Pertanian <i>Self Employed in Non Agriculture</i>	10,39	1,91	6,54
Pekerja Keluarga/tak Dibayar <i>Unpaid Worker</i>	7,49	32,55	18,87
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2010

Source: National Labour Force Surveys in August 2010

**Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Status Sosial
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**

*Percentage of Population by Regency/City and Urban/Rural
in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/kota <i>Regency/City</i>	Status Sosial/ <i>Social Status</i>		
	Penduduk Miskin/ <i>Poverty</i>	Penduduk Tidak Miskin/ <i>Not Poverty</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	23,15	76,85	100,00
Bantul	16,09	83,91	100,00
Gunungkidul	22,05	77,95	100,00
Sleman	10,70	89,30	100,00
Yogyakarta	9,75	90,25	100,00
Daerah Istimewa	15,63	84,37	100,00

Sumber: Susenas Juli 2010

Source : July 2010, National Social Economic Survey

**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota
dan Sumber Penerangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**

*Percentage of Households by Regency/City and Source of Lighting
in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/Kota <i>Regency/ City</i>	Sumber penerangan/ <i>Source of Lighting</i>				
	Listrik PLN/ <i>PLN Electricity</i>	Listrik non PLN/ <i>Non PLN Electricity</i>	Petromak/ Aladin/ <i>Pumped Lamp</i>	Pelita/Sentir/ <i>Oil Lamp</i>	Lainnya/ <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	99,71	0,00	0,00	0,29	0,00
Bantul	99,75	0,00	0,00	0,25	0,00
Gunungkidul	98,89	0,00	0,00	1,05	0,06
Sleman	99,74	0,00	0,00	0,21	0,05
Yogyakarta	99,84	0,00	0,16	0,00	0,00
Daerah	99.59	0,00	0,02	0,36	0,03

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Banyaknya Pelanggan Listrik menurut Unit Pelayanan
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2010**
*Number of Consumers of Electrical Power by Service Unit
in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2008-2010*

Unit Pelayanan Service Unit	Tahun/Year		
	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	80 656	83 625	86 430
Bantul	128 297	137 215	141 789
Gunungkidul	134 083	132 276	137 063
Yogya Selatan	95 772	98 225	101 515
Yogya Utara	70 400	72 011	74 413
Sleman	100 578	103 691	108 039
Sedayu	88 064	90 429	94 450
Kalasan	72 443	75 044	76 086
Daerah Istimewa Yogyakarta	770 293	792 516	819 785

Sumber: PLN Wilayah XIII Cabang Yogyakarta

Source : Government Electricity Company for Area XIII Distribution of Yogyakarta Sub Division

**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota
dan Sumber Air Minum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**
*Percentage of Households by Regency/City and Source of Drinking Water
in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/Kota <i>Regency/ City</i>	Sumber air minum/Source of Drinking Water					
	Air dlm Kemasan/ Packaging Water	Ledeng/ Pipe	Pompa/ Pump	Sumur/Ma- ta Air Terlindung/ Protected well/Protec- ted spring	Sumur/Mata Air Tidak Terlindung/ Unprotected well/Unpro- tected spring	Air hujan, lainnya/ Rain Water, Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	1,63	11,81	1,69	67,80	17,06	0,00
Bantul	14,62	3,66	10,03	65,63	6,06	0,00
Gunungkidul	1,49	14,10	9,62	45,22	11,90	17,66
Sleman	25,80	3,45	4,72	61,47	4,56	0,00
Yogyakarta	43,79	8,85	16,30	30,90	0,16	0,00
Daerah Istimewa	18,22	7,03	8,12	56,32	7,01	3,31

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Minum
ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010**
*Percentage of Households by Regency/City and Distance Between Source of Drinking Water
to Nearest Septic Tank or Other Sanitary Facilities
in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2010*

Kabupaten/kota <i>Regency/City</i>	Jarak penampungan/ Distance (M)		
	≤10	>10	Tidak tahu Unknown
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	19,56	77,25	3,20
Bantul	21,23	74,55	4,21
Gunungkidul	9,28	88,32	2,40
Sleman	15,44	79,40	5,16
Yogyakarta	31,15	57,70	11,15
Daerah Istimewa	17,88	77,46	4,66

Sumber: Susenas 2010

Source : 2010, National Social Economic Survey

**Banyaknya Jemaah Haji menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003M/1422H –2006M/1425H**
*Number of Haji Pilgrim by Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002M/1422H-
2006M/1425H*

Kabupaten/kota <i>Regency/City</i>	2007M/1427H	2008M/1428H	2009M/1429H	2010M/1430H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	225	253	214	221
Bantul	773	724	719	831
Gunungkidul	136	184	193	252
Sleman	1 267	1 334	1 406	1 274
Yogyakarta	663	594	558	499
Daerah	3 064	3 089	3 090	3 077

Sumber : Kanwil Depag. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Source : *Regional Office of Religious Affairs Department of Daerah Istimewa Yogyakarta Province*

Daftar Pustaka/ References

- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2010, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, 2010, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010, *Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*

<http://yogyakarta.bps.go.id>